



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

Yogyakarta , 31 Januari 2022



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun Laporan Kinerja (LKJ) OPD Tahun 2021 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah .

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Yogyakarta, 31 Januari 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1: Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat**
Dengan Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Formula Indikator : 50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya
Capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2021 adalah **83,62 %** dari target **86,56 %** atau tercapai **103,51 %**.

- b. **Sasaran 2: Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat**
Dengan Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Formula Indikator : 70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai. Capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2021 adalah **93,55 %** dari target **93,56 %** atau tercapai **100 %**.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas PUPKP Kota Yogyakarta ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v -vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu – Isu Strategis	3
1.4. Kepegawaian	3
1.5. Sarana dan Prasarana	6
1.6. Keuangan	6
1.7. Sistematika LKJIP	7
BAB II PERENCANAAN	
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja 2021	12
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	16
3.3. Realisasi Anggaran.....	33
3.4. Analisis Efisiensi	36
3.5. Inovasi	37
3.6. Capaian Dana Keistimewaan Tahun 2021	38
BAB V PENUTUP	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	4
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021.....	4
Tabel 1.3.	Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja	5
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Naban Berdasarkan Jenis Kelamin...	5
Tabel 1.5.	Sarana Prasarana Perkantoran	6
Tabel 1.6.	Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	6
Tabel 2.1.	Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022.....	10
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis Dinas PUPKP Tahun 2021.....	11
Tabel 2.3.	Sasaran, Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Sasaran	11
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Murni)	13
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan)	13
Tabel 2.6.	Target Belanja Dinas PUPKP Tahun 2021	13
Tabel 2.7.	Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran	14
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021	15
Tabel 3.3.	Target dan realisasi Indikator Tujuan	16
Tabel 3.4.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	17
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2021.....	18
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021.....	18
Tabel 3.7.	Pengukuran Indikator Tujuan dengan Tahun Sebelumnya	19
Tabel 3.8.	Pengukuran Sasaran dengan Tahun Sebelumnya	19
Tabel 3.9.	Pengukuran Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	20
Tabel 3.10.	Analisis Kebutuhan Sumber Daya	22
Tabel 3.11.	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	23
Tabel 3.12.	Realisasi Pendapatan Tahun 2021.....	32
Tabel 3.13.	Realisasi Belanja Tahun 2021	34
Tabel 3.14.	Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis	34
Tabel 3.15.	Realisasi dan Target Belanja pada Program Internal	35
Tabel 3.16.	Analisis Efisiensi	36
Tabel 3.17.	Capaian Anggaran Dana Keistimewaan	37

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1. Struktur Organisasi DPUPKP Tahun 2021.....	2
---	---

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

1.1 Struktur Organisasi

1.2 Fungsi dan Tugas

1.3 Keadaan Pegawai

1.4. Keadaan Sarana
dan Prasarana

1.5 Keuangan

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

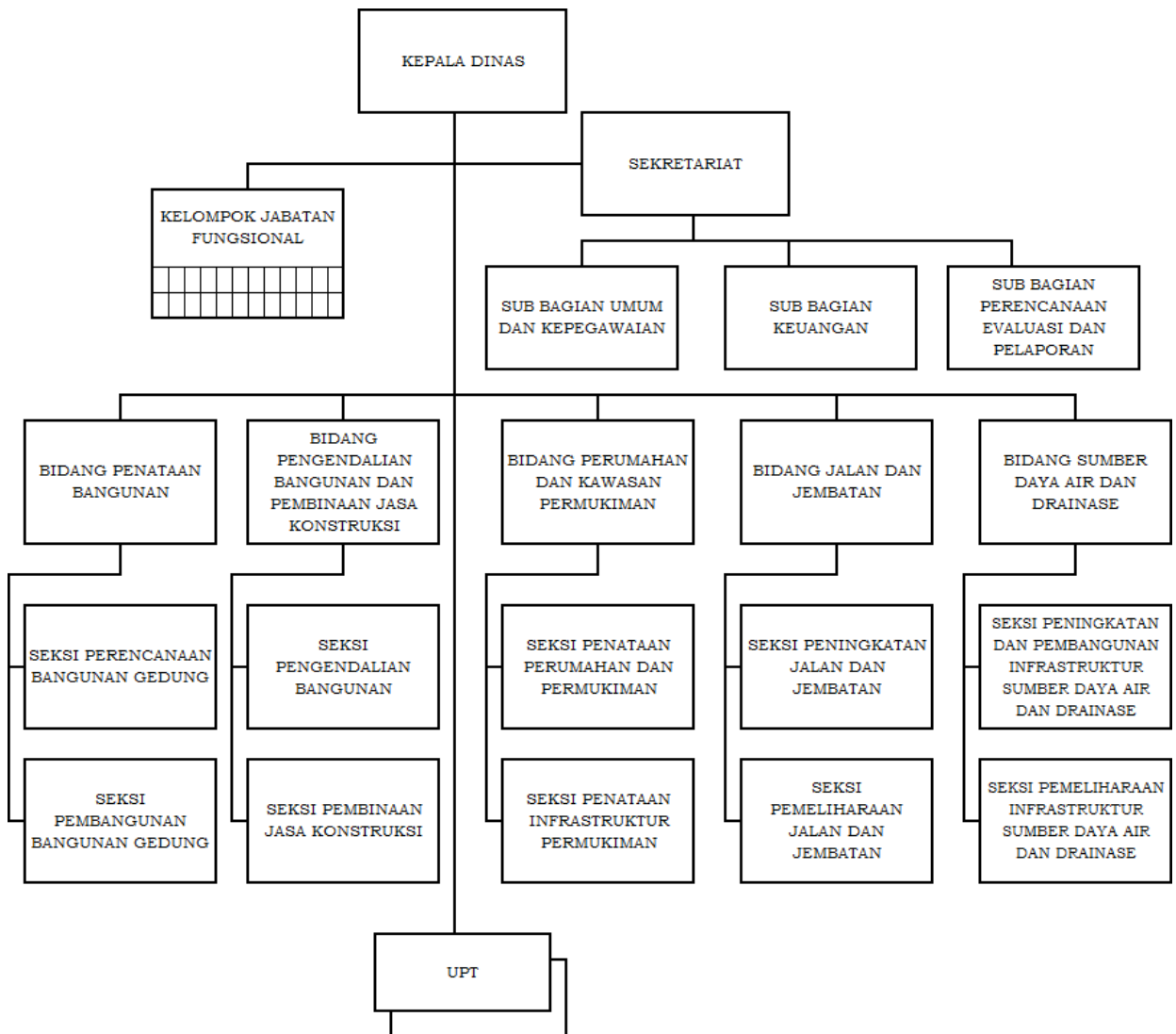
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukkan pada bagan berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, tugas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- f. pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan *Detail Engineering Design* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi, baik saluran tertutup dan terbuka memiliki sedimentasi berupa sampah dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang
2. Terdapat saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah dan pada saluran lain yang berfungsi sebagai saluran irigasi
3. Konstruksi talud yang rata rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman
4. Usia talud yang rata rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi
5. Kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan
6. Strategi untuk mengurangi dan mengefisienkan rekening PJU dengan pengelolaan PJU hemat energi
7. Kawasan kurang layak huni yang tersentra di bantaran sungai dan kurang memiliki sarana prasarana dasar permukiman yang baik.
8. Belum semua bangunan gedung pemerintah, kesehatan dan pendidikan memiliki sarana prasarana yang mendukung disabilitas.
9. Belum semua tenaga kerja konstruksi di kota yogyakarta memiliki sertifikat , mendorong untuk lebih meningkatkan kapasitas konstruksi di wilayah kota yogyakarta

1.4. KEPEGAWAIAN

1. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman terhitung per Desember 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 99 orang PNS, 50 orang Tenaga Teknis yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1.

Komposisi PNS berdasarkan pangkat dan golongan.

JABATAN	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda /Gol.IV.c	1
Sekretaris	Pembina TK I / Gol. IV .b	1
Kepala Bidang	Pembina / Gol.IV.a	5
Kepala UPT	Pembina / Gol.IV.a	1
Kepala Sub Bagian / Seksi	Penata Tingkat I-III/d	13
Kepala UPT	Penata Tingkat I-III/d	2

Kepala Sub Bagian / Seksi	Penata-III/d	10
Staf	Penata Tingkat I-III/d	2
	Penata-III/c	-
	Penata Muda TK I / Gol.III.b	21
	Penata Muda / Gol.III.a	11
	Pengatur TK I/ Gol.II.d	15
	Pengatur / Gol.II.c	9
	Pengatur Muda TK /Gol II.b	2
	Pengatur Muda TK /Gol II.a	4
	Juru TK I / I.d	2
	Juru / I.c	2

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2021

Tabel 1.2.

Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S2	18
2	S1	25
3	D3	5
5	SMA	51
6	SMP	9
7	SD	6

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2021

Tabel 1.3

Komposisi Tenaga Bantuan (NABAN) menurut jenjang pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S1	6
3	D3	2
5	SMA/SMK	6
7	SD	1

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2021

Tabel 1.4

Komposisi Tenaga Teknis (TT) menurut jenjang pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S1/D4	21
3	D3	4
5	SMA/SMK	12

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2021

2. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

Tabel 1.5
Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

No	Kelompok Jabatan/Sub Bag/Seksi	Jumlah Pegawai	
		Eksisting	Ideal
1	Kepala Dinas	1	1
2	Jabatan Fungsional	1	4
3	Sekretariat	24	40
4	Bidang Penataan Bangunan	25	58
5	Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	15	
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	7	14
7	Bidang Jalan Jembatan	8	23
8	Bidang Pengairan dan Drainase	10	21
9	UPT Pengelolaan Rumah Susun	5	16
10	UPT Pengelolaan Air Limbah	31	52
11	UPT Penerangan Jalan Umum	24	33
Jumlah		151	262

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Teknis Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

tabel 1.6 sebagai berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	32
2	Wanita	117

1.5. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tabel 1.5
Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Per 31 Desember 2021

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (unit)
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 6	18	-	-	18
3	Kendaraan Roda 4	17	-	2	19
4	Kendaraan Roda 3	18	-	-	18
5	Kendaraan Roda 2	15	-	-	15
6	Komputer Desktop	25	6	6	37
7	Komputer Laptop	4	-	-	4
8	Printer	24	2	2	28
9	Air Conditioning	14	-	-	14
10	UPS	21	1	8	30

1.6 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.6.
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta Tahun 2021

Jenis Belanja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (DPPA)
PENDAPATAN	4.591.758.000,-
BELANJA DAERAH	179.713.596.077,-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	156.870.177.936,-
I Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	16.871.633.720,-
1 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.500.000,-
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.160.000,-
1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	15.760.000,-
1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.580.000,-
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.464.437.316,-
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.457.207.316,-
2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran	7.230.000,-
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	668.254.295,-
3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,-
3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.974.295,-

3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	84.291.000,-
3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	2.400.000,-
3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.589.000,-
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.715.000,-
4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.715.000,-
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.192.693.049,-
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.720.000,-
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik	199.677.000,-
5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	978.296.049,-
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.320.034.060,-
6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	866.206.060,-
6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.328.000,-
6.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.500.000,-
6.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000,-
II Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.005.448.188,-
1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.011.244.000,-
1.1.Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.047.156.500,-
1.2.Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.251.597.515,-
1.3.Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Sungai	1.712.489.985,-
2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 10 ha dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	1.994.204.188,-
2.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	480.490.600,-
2.2 Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.055.170.000,-
2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	458.543.588,-
III Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.758.600.000,-
1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Sungai Dalam Daerah Kabupaten /Kota	2.758.600.000,-
1.1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.170.638.000,-
1.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	226.600.000,-
1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.361.362.000,-
IV Prog ram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.725.453.080,-
1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	7.725.453.080,-
1.1 Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	1.792.753.080,-

1.2 Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2.127.800.000,-
1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Air Limbah Domestik	3.804.900.000,-
IV Program Penataan Bangunan Gedung	35.414.567.948,-
1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung , serta Implementasi SIMBG	35.414.567.948,-
1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung , serta Implementasi SIMBG	112.970.000,-
1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	2.564.281.868,-
1.3 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota	32.737.316.080,-
V Program Pengembangan Jasa Konstruksi	235.320.000,-
1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	54.180.000,-
1.1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	32.965.000,-
1.2 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	73.500.000,-
1.3 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	21.215.000,-
2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	181.140.000,-
2.1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.980.000,-
2.3 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi.	179.160.000,-
VI Program Penyelenggaraan Jalan	46.434.762.000,-
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	46.434.762.000,-
1.1 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20.443.412.000,-
1.2 Pemeliharaan Berkala Jalan	18.965.290.000,-
1.3 Pemeliharaan Rutin Jalan	6.412.280.000,-
1.4 Pemeliharaan Rutin Jembatan	613.780.000,-
VII Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS)	41.239.743.000,-
1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	41.239.743.000,-
1.4 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	20.865.000.000,-
1.2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	20.374.743.000,-

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19.343.418.141,-
I Program Kawasan Permukiman	7.206.319.140,-
1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.206.319.140,-
1.2 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	605.600.000,-
1.3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6.600.719.140,-
II Program Pengembangan Perumahan	1.147.350.161,-
1 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	1.147.350.161,-
1.1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	1.147.350.161,-
III Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.989.748.840,-
1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	10.989.748.840,-
1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	7.017.500.020,-
1.2 Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	3.972.248.820,-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.500.000.000,-
I Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	3.500.000.000,-
1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.500.000.000,-
1.3 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	3.500.000.000,-

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sistematika penulisan LKj IP.

3. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang

ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

6. LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi:

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Rencana Anggaran Tahun 2019*
3. *Perjanjian Kinerja Tahun 2019*

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Memasuki Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan manifestasi komitmen Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017). RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2021

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2017 – 2022

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Infrastruktur wilayah meningkat melalui infrastruktur pekerjaan umum meningkat dan infrastruktur perumahan dan permukiman meningkat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah kota Yogyakarta pada misi ke 6 (enam) Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah “ **Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum berkualitas Serta Perumahan Permukiman Layak Huni dan Sehat** “ dengan indikator tujuan mengukur Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman dengan target **86,60 %** , dengan rumusan sebagai berikut : 70 % Indeks Pekerjaan Umum + 30 % Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan(%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum meningkat	74,19	75,41	79,32	82,55	83,62	87,71
2.	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	89,28	90,33	91,16	92,38	93,55	94,89

2.1.3. Strategi, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan beberapa program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Untuk Mencapai Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan
<p>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat</p>	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing - Rehabilitasi Tanggul Sungai - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Sungai <p>2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan SekSekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 H 10 ha dalam 1 (satu) Kabupaten Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Rehabilitasi Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Sungai Dalam Daerah Kabupaten /Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota - Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Air Limbah Domestik <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung , serta Implementasi SIMBG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung , serta Implementasi SIMBG - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota

	<p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi <p>2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi - Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi. <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi - Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis - - - Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan - Pemeliharaan Rutin Jembatan <p>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS)</p> <p>1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru
<p>Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat</p>	<p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>Program Kawasan Permukiman</p> <p>1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>1. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus <p>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</p> <p>1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan Bangunan dan Lingkungan - Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan
1. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
 - Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Murni)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum meningkat	%	83,62
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruk tur Perumahan dan Permukiman Meningkat	%	93,55

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja terkait dengan perubahan anggaran tahun 2021 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1.	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	%	83,62

2.	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	%	93,55
----	---	---	---	-------

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan dengan anggaran Belanja murni sebesar Rp. 159.161.067.607 ,- Dengan rincian Belanja Operasi Rp. 61.693.519.732,- Belanja Modal Rp.97.467.547.875,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp.179.713.596.077 ,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 67.390.060.802,- dan Belanja Modal Rp.112.323.535.275 ,-.

2.3.1. Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.6.

Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman APBD Perubahan Tahun 2021

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Operasi	Rp. 67.390.060.802 ,-	91
Belanja Modal	Rp. 112.323.535.275 ,-	91
Jumlah	Rp. 179.713.596.077 -.	91

2.3.2. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu “Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat” “dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat” , sehingga seluruh anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2021 dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut.

Tabel 2.7.

Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	156.870.177.936,-	91	-
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	19.343.418.141,-	91	-

2.4 IKU (Indikator Kinerja Utama)

Indikator Kinerja Utama digunakan perencanaan tahunan, penetapan kinerja ,pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja

Adapun tabel indikator kinerja utama tercantum dalam tabel 2.8 sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100	Data jalan kondisi mantap dan PJU (bina marga), Data saluran pengairan dan drainase (SDA), jumlah bangunan gedung pemerintah (cipta karya)
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100	Luas kawasan dan sarana prasarana permukiman baik (sudah terpenuhi sarana prasarana dasarnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan); jumlah tangki septik yang tersambung ke IPAL Sewon)

2.5 Rencana Aksi

Tujuan, sasaran, program serta tolak ukur untuk mencapai indikator-indikator tersebut diatas dituangkan dalam rencana aksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta .

Adapun tabel rencana aksi terdapat pada lampiran dalam laporan ini

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi:

1. Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
3. Realisasi Anggaran
4. Analisis Efisiensi
5. Inovasi
6. Capaian Anggaran Danais Tahun 2021

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Intervasi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	%	83,62	86,56	103,52 %
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	%	93,55	93,56	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Sasaran 1 Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan tercapai 103,52 % dan Sasaran 2 Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan tercapai 100 %

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KIERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020. Secara rinci akan diuraikan dalam tabel – tabel dibawah ini.

3.2.1. Capaian Indikator Tujuan

Pencapaian Indikator Tujuan dalam mewujudkan Infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas serta perumahan permukiman yang layak huni dan sehat dapat dihitung berdasarkan indeks kualitas infrastruktur pekerjaan umum perumahan dan permukiman. Adapun capaian pada tahun 2021 adalah sebagaimana tertera dalam table berikut ini :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman	86,60	88,66	102,38

Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat				
--	--	--	--	--

Adapun Rumusan Formula Indikator Tujuan sebagai berikut :

Target :

70 % Indeks Pekerjaan Umum + 30 % Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

$$70 \% (83,62 \%) + 30 \% (93,55 \%) = 86,60 \%$$

Realisasi :

70 % Indeks Pekerjaan Umum + 30 % Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

$$70 \% (86,56 \%) + 30 \% (93,56 \%) = 88,66 \%$$

Pencapaian 102,38 % dari target 86,60 % tercapai 88,66 % dikarenakan pencapaian sasaran kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat tercapai 102,38 % dari target 83,62 % terealisasi 86,56 % dan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat tercapai 100 % dari target 93,55 % terealisasi 93,56 % . capaian program yang lebih dari 100 % yaitu persentase kualitas saluran pengairan/ penyediaan bangunan talud dari target 91,57 % tercapai 92,10 % atau pencapaian 100,58 % , persentase cakupan air saluran air limbah yang memadai dari target 86,21 % tercapai 88,47 % atau tercapai 102, 62 % , persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan dari target 89 % tercapai 96,67 % atau pencapaian 108,62 % , persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan dari target 51,04 % tercapai 51,88 % atau tercapai 101,65 %

3.2.2 Sasaran strategis (Analisa per Sasaran Strategis)

Tolak ukur capaian sasaran

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat berasal dari Indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat yang diharapkan adanya peningkatan disetiap tahunnya (dari tahun sebelumnya) dan diperoleh dari Indeks Infrastruktur Bina Marga , Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air, Indeks Infrastruktur Cipta Karya (Bangunan, Jasa konstruksi), yang merupakan capaian yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk mendukung misi 6 dalam RPJMD yaitu dengan membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman agar infrastruktur wilayah meningkat.

Indeks Infrastruktur Bina Marga dapat dihitung dari persentase kualitas sarana dan prasarana jalan , jembatan dan bangunan pelengkap jalan + persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan .

Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air dapat dihitung dari persentase kualitas saluran pengairan dan talud + persentase drainase kondisi baik.

Indeks Infrastruktur Cipta Karya dapat dihitung dari persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat berasal dari Indikator Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat yang diperoleh dari Indeks Infrastruktur Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman dan Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai , yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang merupakan merupakan indikator utama yang menjadi sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Tahun 3.4.

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) x 100
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100

3.2.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Kinerja sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat dengan indikator Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat pada tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel 3.5

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2021

No	Tujuan	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan	86,60	88,66	102,38	89,87	101,36 %

Permukiman Meningkat					
-------------------------	--	--	--	--	--

3.2.4. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kode
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	83,62 %	86,56 %	103,51 %	Sangat tinggi
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	93,55 %	93,56 %	100 %	Sangat Tinggi

3.2.5. Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga RPJMD 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel.3.7.
Pengukuran Indikator Tujuan dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi		20 21		Capaian (%)	Kode
			2019 (%)	2020 (%)	Target (%)	Realisasi (%)		
1.	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman	83,37	85,48	86,60	88,66	102,38	Sangat Tinggi

Tabel.3.8.
Pengukuran Sasaran dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		20 21		Capaian (%)	Kode
			2019 (%)	2020 (%)	Target (%)	Realisasi (%)		
1.	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	80,03	82,55	83,62	86,56	103,51	Sangat Tinggi
2.	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	91,16	92,38	93,55	93,56	100	Sangat Tinggi

3.2.6. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi Kinerja tahun 2021 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)					Realisasi Tahun 2021 (%)
					I	II	III	IV	V	
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	74,19	75,41	80,03	82,55	83,62	86,56
			Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	89,28	90,33	91,16	92,38	93,55	93,56

3.2.7. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Dalam dokumen perencanaan Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan , tetap berkaitan kepada program yang ada dalam dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun untuk penentuan Indikator dalam Tujuan,Sasaran, maupun Program tidak menggunakan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena pada tahun 2021 hanya ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk perhitungan indikator dalam SPM bidang Perumahan dan Permukiman yaitu perbaikan rumah terdampak pembangunan dan cakupan air limbah yang sudah tertuang dalam indikator program yaitu cakupan saluran air limbah memadai

dengan standar pusat tercapai 100 % dari target daerah , dan di tahun 2021 telah tercapai 102,62 %. Dari target 86,21 % tercapai 88,74 %.

3.2.8 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun pertama Renstra, dengan tercapainya indikator tujuan maupun sasaran lebih dari 100 %, Indikator tujuan dengan target 86,60 % yang berasal dari 70 % indeks pekerjaan umum + 30 % indeks perumahan dan permukiman terealisasi 88,66 % atau tercapai 102,38 %

Sedangkan indikator sasaran, untuk indikator sasaran 1 indeks infrastruktur pekerjaan umum meningkat 83,62 % tercapai 86,56 % dan indikator sasaran 2 indeks perumahan dan permukiman meningkat 93,55 % tercapai 93,56 %

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan sasaran infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas serta perumahan dan permukiman yang nyaman dengan didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun anggaran- anggaran dari pusat serta terselenggaranya program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kualitas infrastruktur pekerjaan umum meningkat melalui pembangunan pedestrian jalan Perwakilan , Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Gramedia – Bethesda) , Pembangunan Kawasan Jalan KHA Dahlan (Danais) ,Peningkatan Lampu Kawasan Pasar Ngasem, Penataan Lampu PJU Jl.Suryotomo – Pasar Kembang – Jlagran ,Pembangunan Talud Sungai Winongo

Sedangkan yang mendukung sasaran infrastruktur perumahan dan permukiman dicapai melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui TMMD dan rumah terdampak pembangunan , serta peningkatan kualitas rumah swadaya

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun kedua Renstra hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.

- Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota.

3.2.8.1 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat, serta sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Adapun tabel Analisis penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel 3.10

Tabel 3.10
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab 258 sebanyak orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 149 orang.	Masih dibutuhkan 109 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan .
Sumber Dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan infrastruktur kota	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan infrastruktur kota walaupun belum semua titik dapat tertangani dengan alasan membutuhkan biaya yang besar	Masih membutuhkan sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas.	Mengajukan usulan anggaran ke tingkat pusat baik melalui dana alokasi khusus (DAK) ataupun Dana Keistimewaan (Danais)
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Sarana Prasarana yang mendukung operasional di lapangan saat ini belum dapat dipergunakan secara bersama untuk menjangkau infrastruktur di semua kecamatan.	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar terjangkau ke seluruh wilayah kota Yogyakarta	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional

3.2.9 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 capaian dari output kegiatan tersebut, adapun program dan kegiatan yang ada juga tercantum dalam rencana aksi tahun 2021, adapun capaian program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 .

Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Realisasi
1	2	3	8	9	16
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud	92,10 %
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		100%
			Pembangunan Talud Sungai	66.67 m	
			Rehabilitasi Tanggul Sungai		100%
			Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.00 dokumen	
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	55.90 m	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100%
			Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	636.00 m	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		100%
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	45.40 m	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi		100%
			Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju	20.68 m	

	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		100%
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	800.00 m	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	87,60 %
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		83%
	Pembangunan Sistem Drainase	233.27 m	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		100%
	Rehabilitasi Saluran Drainase	34.00 Unit	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		100%
	Pemeliharaan Sistem Drainase	10000.00 m	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	90,04 %
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Pendataan Bangunan Gedungserta Implementasi SIMBG		97.93%
	Rekomendasi IMB	600.00 Rekomendasi IMB	
	Pengawasan Pelaksanaan IMB	12.00 Bulan	
	Rekomendasi SLF	80.00 Rekomendasi SLF	
	Rekomendasi SKB	80.00 Rekomendasi SKB	
	Petunjuk Teknis Raperda Bangunan	1.00 Dokumen	
	PerencanaanPembangunanPengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		100%
	Penyusunan DED	13.00 Dokumen	

		Rekomendasi Keandalan Bangunan	1.00 Dokumen	
		Updating Data Ledger	1.00 Dokumen	
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		100%
		Pembangunan dan Renovasi Gedung	12.00 lokasi	
		Pemeliharaan Jaringan Listrik / Tambah daya	1.00 Pekerjaan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik	96,67 %
			Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	51,88 %
		Pemeliharaan Berkala Jalan		100%
		Pemeliharaan Berkala Jalan	45056.00 m2	
		Pemeliharaan Rutin Jalan		100%
		Data Kondisi Jalan	1.00 Dokumen	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	6111.17 m2	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan		83.71%
		Data Kondisi Jembatan	1.00 Dokumen	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	239.40 m2	
		Assesment Jembatan	1.00 Paket	
		Penyusunan RencanaKebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Upt Penerangan Jalan Umum		99.99%

			Pendataan PJU Tahap IV	1.00 Dokumen	
			Peningkatan PJU Kampung	44.00 titik	
			Penyusunan DED Peningkatan PJU dan DED Pemeliharaan PJU TH. 2022	5.00 Dokumen	
			Pemeliharaan PJU	1000.00 titik	
			Peningkatan PJU Jalan Protokol	90.00 titik	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase tenaga kerja trampil	92,06 %
				Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		100%
			Tenaga trampil konstruksi	120.00 orang	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		100%
			Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi	4.00 kali	
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		100%
			Pengelolaan SIPJAKI	10.00 bulan	
			Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		100%
			Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	2.00 Dokumen	
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	88,47 %
				Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	30 %
				Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,28 %

		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		100%
		Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	237.00 SR	
		Penyusunan DED Perencanaan SR	2.00 Dokumen	
		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		100%
		Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	174.00 SR	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Upt Pengelolaan Air Limbah		100%
		Pengelolaan Air Limbah	1149.00 m	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	97,10 %
		Penataan Bangunan dan Lingkungan		100%
		Pembangunan Talud Permukiman	586.53 m3	
		Penataan Kawasan Permukiman	3.00 Kawasan	
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		100%
		Land Clearing Kawasan Prioritas	5000.00 m2	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	10.00 Pekerjaan	
		Pemeliharaan Talud Permukiman	551.00 m3	
		Penyusunan DED	2.00 Dokumen	100%
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman Kumuh yang tertangani	79,32 %

		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plandan Detail Engineering Design (DEDPeremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		100%
		Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman	3.00 Dokumen	
		Perencanaan Pencegahan Lingkungan PermukimanKumuh	7.00 Dokumen	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		100%
		Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	201.00 unit	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	99 %
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa		100%
		Pengelolaan Rusunawa	3.00 Rusun	

3.2.10 .Analisis Pencapaian Program

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator Program :

a. Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan

Pelengkap Jalan 89 % terealisasi 96,67 % atau tercapai

Formula Indikator :

$$(60 \% \text{ Jalan} + 30 \% \text{ Pelengkap Jalan} + 10 \% \text{ Jembatan}) \\ (60 \% * 230,33/233,21 + 30 \% * 175,34/186,09 + 10 \% * 33/36) = 96,67 \%$$

Jalan kondisi mantap	: 230,33 km
Pelengkap Jalan Kondisi mantap	: km
Jembatan kondisi mantap	: 33 unit
Total Panjang Jalan	: 233,21 km

Total Pelengkap Jalan	: 186,09 km
Total Jembatan	: 36 unit

Dengan terealisasinya tolak ukur pekerjaan pemeliharaan berkala jalan sebesar 45.056 m² dan pemeliharaan rutin jalan sebesar 6111.17 m , sehingga menambah indikator jalan kondisi mantap di tahun 2021 sesuai dengan yang ditargetkan atau tercapai 108,62 % .

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jalan di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan kadang dapat mengalami perubahan rencana
3. Relokasi anggaran untuk penanganan covid 19 menyebabkan beberapa pekerjaan harus ditunda sehingga penanganan kualitas infrastruktur belum sepenuhnya terakomodir

Tindak Lanjut :

- Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
- merencanakan kembali pekerjaan yang tertunda di tahun berikutnya

b. Persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan 47,03 %

Formula Indikator :

$$\frac{\text{Jumlah PJU Ramah Lingkungan}}{\text{Jumlah Titik PJU}} \times 100 \%$$
$$\frac{14.199 \text{ titik}}{28.413 \text{ titik}} \times 100 \% = 51,88 \%$$

Indikator yang digunakan saat ini adalah PJU ramah lingkungan atau yang menggunakan LED , dari target 51,04 % terealisasi 51,88 % atau tercapai 101,65 %.

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Ketersediaan barang-barang pabrikan yang sesuai spesifikasi teknis
2. Perencanaan tepat guna tepat sasaran sehingga pengerjaan selesai tepat waktu
3. Pemilihan penyedia jasa yang tepat

Faktor yang Menghambat :

1. Berkaitan dengan waktu harus menunggu antrian pengajuan KWH meter baru ke PLN , sehingga menghambat ketepatan waktu pelaksanaan.
2. Kondisi dilapangan yang seringkali mengalami perubahan dengan adanya permintaan dari warga dan kondisi arus lalu lintas di jalan yang semakin padat sehingga pengerjaannya terhambat.

Tindak lanjut :

1. Koordinasi dengan masyarakat dan LPMK , Kelurahan dan Kecamatan.
2. Koordinasi dengan Instansi lain seperti PLN, Kepolisian dan Dinas Perhubungan

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator Program :

- **Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud 92,10 %**

Terealisasi 92,10 % dari target 91,57 % atau tercapai 100,58 %

Formula Indikator : $\frac{\text{Panjang Talud dan Saluran Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Talud dan Saluran Pengairan}} \times 100 \%$

Total Panjang Talud dan Saluran Pengairan

$$\frac{60.309,13 \text{ m}}{65.482,6 \text{ m}} \times 100 \% = 92,10 \%$$

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- **Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat 87,60 %**

Terealisasi 87,60 % dari target 87,60 % atau tercapai 100,02 %

Formula Indikator : $\frac{\text{Panjang Saluran Drainase kondisi baik}}{\text{Total Panjang Saluran Drainase}} \times 100 \%$

Total Panjang Saluran Drainase

$$\frac{301.414,47 \text{ m}}{344.075 \text{ m}} \times 100 \% = 87,60 \%$$

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

1. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Evaluasi rutin bersama

Tindak Lanjut :

- a. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

4. Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator Program : Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Sesuai Standar Kebutuhan 89 %

Formula Indikator :

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah direhab} \times 100 \%}{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah}} \\ \frac{1446 \text{ unit} \times 100 \%}{1606 \text{ unit}} = 90,44 \% \text{ dari target } 89 \%$$

Terealisasi 90,44 % dari target 89 % atau tercapai 100 %

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

- a. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Persentase tenaga kerja terampil 67,47 %

$$\text{Formula Indikator : } \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi terampil}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kerja konstruksi}} \times 100 \%$$
$$\frac{348}{498} \times 100 \% = 69,88 \%$$

Terealisasi 69,88 % dari target 67,47 % atau tercapai 103, 57 %

- Persentase Peningkatan Kapasitas asosiasi jasa konstruksi 12 %

$$\text{Formula Indikator : } \frac{\text{Jasa konstruksi yang dibina}}{\text{Total anggota asosiasi jasa konstruksi}} \times 100 \%$$
$$\frac{100}{620} \times 100 \% = 16,13 \%$$

Terealisasi 16,13 % dari target 12 % atau tercapai 133,33 %

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Adanya fasilitasi dan kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Surabaya

Hambatan :

1. Kondisi pandemi sehingga beberapa kegiatan pelatihan dan pendataan profil konstruksi ditunda
2. Kesulitan mencari tenaga kerja konstruksi terampil yang berdomisili (KTP) Yogyakarta .

Tindak Lanjut :

1. Mengakomodir tenaga kerja konstruksi terampil yang bekerja di kota Yogyakarta
2. Melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman 96,71 %

Formula Indikator : Kawasan Dengan Sarana Prasarana Baik x 100 %

$$\frac{\text{Total Kawasan Kota}}{3250 \text{ ha}} : \frac{3155,82 \text{ ha}}{3250 \text{ ha}} \times 100 \% = 97,10 \%$$

Terealisasi 97,10 % dari target 96,71 % atau tercapai 100 %

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Persentase Cakupan Saluran Air Limbah Yang Mewadahi 86,21 %

Formula Indikator : Jumlah tangki septik yang baik

(terlayani pengolahan limbah) x 100 %

Jumlah tangki septik yang dimiliki

$$: \frac{93,651 \text{ unit}}{105.854 \text{ unit}} \times 100 \% = 88,47 \%$$

Terealisasi 88,47 % dari target 86,21 % atau tercapai 102,62 %

- Persentase pelayanan SPALD-S akses aman 30 %

Formula Indikator :

$$\frac{\text{Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT} \times 100 \%}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S}}$$
$$: \frac{30 \text{ unit} \times 100 \%}{100 \text{ unit}} = 30 \%$$

Terealisasi 30 % dari target 30 % atau tercapai 100 %

- Persentase pelayanan SPALD-T akses aman 15,10 %

Formula Indikator :

$$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD} \text{ di}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T}}$$
$$: \frac{19.097 \text{ unit} \times 100 \%}{124.951 \text{ unit}} = 15,28 \%$$

Terealisasi 15,28 % dari target 15,10 % atau tercapai 101,19 %

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

- a. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

8. Program Kawasan Permukiman

- Persentase permukiman kumuh yang tertangani 71,57 %

Formula Indikator :

$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{Luas Total Kawasan Kumuh}} \times 100 \%$

Luas Total Kawasan Kumuh

: $\frac{19.097 \text{ unit}}{124.951 \text{ unit}} \times 100 \% = 15,28 \%$

Terealisasi 15,28 % dari target 15,10 % atau tercapai 101,19 %

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

- a. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

8. Program Pengembangan Perumahan

- Persentase tercapainya target retribusi 90 %

Formula Indikator :

$\frac{\text{Realisasi retribusi sewa rusun}}{\text{Target pendapatan tahun berjalan}} \times 100 \%$

Target pendapatan tahun berjalan

: $\frac{405.124.700}{408.756.000} \times 100 \% = 99 \%$

Terealisasi 99 % dari target 90 % atau tercapai 110%

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

- a. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan

Program – program yang ada merupakan perjanjian kinerja pejabat eselon III dan menjadi kewajiban pada bidangnya untuk melaksanakan

3.2.10. Capaian Rencana Aksi

Rencana aksi untuk mencapai sasaran strategis selalu di evaluasi setiap triwulan , dan capaian di akhir tahun anggaran 103,52 % untuk sasaran 1 dan 100 % untuk sasaran 2, adapun evaluasi Rencana Aksi kami lampirkan dalam laporan ini.

3.2.11. Capaian Lain Lain

Selain melaksanakan pekerjaan dari sumber dana APBD , Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan pekerjaan dari dana yang bersumber dari dana keistimewaan (Danais) untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis dinas melalui program Penyelenggaraan Jalan yaitu Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang untuk menambah kenyamanan pejalan kaki , adapun ouput kegiatan yang dihasilkan adalah :

- a. Pedestrian jalan KHA Dahlan terlaksana 100 %
- b. Pedestrian jalan Perwakilan terlaksana 100 %
- c. Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Gamedia – Bethesda) terlaksana 100 %

3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

3.3.1 Realisasi Pendapatan

Pendapatan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Retribusi yang terdiri dari Pengolahan Limbah Cair dan Sewa Mobil Toilet, Izin Mendirikan Bangunan, Lain Lain yang Sah yaitu Sewa Gedung Rusunawa . Adapun realisasi di tuangkan dalam tabel 3.12

Tabel 3.12

**Realisasi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021**

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Retribusi Daerah	4.183.002.000 ,-	6.171.037.784 ,-	148
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	408.756.000,-	405.124.700,-	99
Jumlah	4.591.758.000,-	6.576.162.484,-	143,22

Analisis Pencapaian target :

Pendapatan terdiri dari :

a. Pendapatan Retribusi Daerah

- **Retribusi Jasa Umum** yang merupakan retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa mobil toilet) dengan target Rp. 920.892.000,- terealisasi sebesar Rp.1.097.088.500,- atau tercapai 119 % .

Adapun tercapainya target dikarenakan sebagai berikut :

1. Monitoring Evaluasi terkait retribusi secara intensif dan terjadwal
2. Adanya hasil updating retribusi
3. Dilaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkala.
4. Penambahan sarana prasarana .
- 5 Banyaknya permintaan sewa untuk even-even acara yang membutuhkan pemakaian toilet mobil.

Langkah-langkah kedepan adalah sebagai berikut

1. Pembinaan / sosialisasi bagi WR (wajib Retribusi)
2. Merencanakan sistem pembayaran non tunai untuk mengurangi ketugasan petugas retribusi yang terbatas
3. Sewa untuk even-even acara yang membutuhkan pemakaian toilet mobil.

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.250.000.000,- terealisasi Rp. 5.024.099.284,- tercapai sebesar 155 %

Karena banyaknya pengajuan yang IMB yang telah sesuai dengan persyaratan dan layak untuk dikeluarkan izinnnya

b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan dari barang milik yang merupakan sewa gedung Rusunawa dengan anggaran sebesar Rp. 408.756.000,- terealisasi sebesar Rp. 405.124.700 - atau capaian sebesar 99 %

Alasan pencapaian target sebagai berikut :

- Ada beberapa kamar yang bocor dibagian dag , sudah diperbaiki berkali kali namun tetap bocor atap dan dinding sehingga tidak disewakan .
- Banyak penghuni yang tidak rutin membayar sewa rusun.

Solusi /Tindak Lanjut :

- Pembinaan dan sosialisasi bagi penghuni tentang hak dan kewajiban penghuni Rusun sesuai Perwal 32 tentang Pengelolaan Rumah Susun , Sudah diberi peringatan berkali kali tetapi belum membuahkan hasil.
- Melakukan pendataan dan penilaian kondisi kelayakan gedung secara menyeluruh kemudian melaporkan kepada pemerintah daerah kota Yogyakarta , selanjutnya untuk dipertimbangkan keberlanjutannya .

3.3.2 Realisasi Belanja

terdiri dari

- **Belanja Pegawai** yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN , Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Insentif) ASN dengan anggaran sebesar Rp. 13.457.207.316 ,- terealisasi Rp. 12.660.354.376 ,- atau tercapai 94,08 %
- **Belanja Barang Jasa** merupakan belanja yang mendukung terselenggaranya program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran strategis. Belanja langsung terdiri dari 10 (sepuluh) program , 17 (tujuh belas) kegiatan dan 51 (limapuluhsatu) sub kegiatan Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 53.687.853.486,- terealisasi sebesar Rp. 49.991.424.452.9 atau 93,11 % .
- **Belanja Modal** dengan anggaran Rp. 112.323.535.275,- terelahir sebesar Rp. 101.890.463.425.21 atau 90,71 %

Adapun pencapaian dapat dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13

Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2021

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	13.457.207.316,-	12.660.354.376	94,08 %
Belanja Barang Jasa	53.687.853.486,-	49.991.424.452.9	93,11 % .
Belanja Modal	112.323.535.275,-	101.890.463.425.21	90,71

3.3.3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Realisasi anggaran langsung per sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	83,62 %	86,56 %	103,52	146.201.474.856,-	133.994.858.449,36	91,65
202	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	92,38 %	92,38 %	100	33.512.121.221	30.724.714.294,75	91,68

3.3.4. Realisasi Anggaran Belanja Pada Program Internal

Anggaran belanja pada program internal dipergunakan untuk mendukung kebutuhan internal dinas dan kebutuhan rutin yang mendukung sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan tertuang dalam tabel 3.15

Tabel 3.15

Realisasi dan Target Belanja Pada Program Internal

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	90 %	16.871.633.720,-	15.916.440.034.34 (94 %)

3.4. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi dipergunakan untuk menampilkan atas efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran pada setiap sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam table 3.16 berikut ini

Tabel.3.16

Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\leq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	103,52	91,65	11,87
2.	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	100	91,68	8,32

Dari 2 (dua) sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, capaian kinerjanya telah sesuai bahkan ada yang melebihi target dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan telah mencapai kinerja sebesar 103,52 % dengan efisiensi anggaran sebesar 11,87 % . Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui beberapa pekerjaan yang mengalami sisa lelang, dan adanya pencapaian indikator program yang melebihi target sehingga dapat sebagian memanfaatkan sebagian efisiensi tanpa harus menambah anggaran.
2. Sasaran Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan telah mencapai

kinerja sebesar 100 % dengan efisiensi anggaran sebesar 8,32 % .Efisiensi anggaran diperoleh melalui pekerjaan yang mengalami sisa lelang.

Dari anggaran belanja yang menunjang sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 179.713.596.077 ,- dengan realisasi Rp. 164.719.572.744,11 , telah menyelesaikan 17 kegiatan pada program –program sasaran strategis dengan capaian 100 % dan 103, 52 % dengan tingkat efisiensi sebesar 11,87 % dan 8,32 %.

3.5. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintah menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menginisiasi inovasi sebagai berikut :

1. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Penerangan Jalan Umum (SIMPENJALU)
Pendataan titik PJU berbasis GIS (Geographic Information System) menggunakan stiker QR Code yang memiliki fitur antara lain layanan publik, management aset PJU, analisis ekonomi dan analisis Energi , tujuannya adalah terselesaikannya Ledger PJU Kampung berbasis GIS. Sasaran adalah titik PJU Kampung se-Kota Yogyakarta terdata dalam Ledger PJU
2. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sanitasi Air Limbah Domestik (SIMPELSALDO)
Sistem Setempat (Onsite) untuk mendukung kemudahan data bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam penentuan kebijakan pengelolaan SPALD-S masyarakat. Pendataan langsung sistem sanitasi setempat masyarakat dilakukan dan hasilnya diinputkan ke dalam SIMPel SALDo. Kegunaan dari pendataan *septic tank* adalah untuk dapat mengetahui dengan pasti kondisi sistem sanitasi setempat yang digunakan oleh masyarakat. Setelah data terkumpul, maka terhadap sistem yang bermasalah dilakukan pengelolaan dan intervensi sesuai kebutuhan. Dalam milestone ini berhasil dirumuskan kebijakan untuk prioritas penanganan permasalahan sanitasi masyarakat baik yang memiliki *septic tank* maupun tidak. Ada enam rujukan prioritas yang ditawarkan yaitu: rekomendasi pengurusan, pembangunan *septic tank* individual, pembangunan *septic tank* komunal, pembangunan IPAL komunal, dan penyaluran ke sistem terpusat jika dekat dengan jaringan perpipaan air limbah.

3.6. Capaian Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Penataan Ruang

Selain dana APBD Kota Yogyakarta , Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan yang berasal dari dana keistimewaan dengan realisasi sebagaimana tercantum dalam table 3.17

Tabel 3.17
Capaian Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	20.865.000.000	20.817.547.011.39	100
2.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	20.374.743.000	20.369.573.486.32	100
2.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	3.500.000.000	3.029.263.339.88	87 %

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi:

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan . Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Dari analisis 2 (dua) indikator kinerja sasaran dalam Penetapan Kinerja Perubahan untuk indikator sasaran kualitas infrastruktur pekerjaan umum meningkat tercapai 103,52 % dan sasaran kualitas perumahan dan permukiman meningkat tercapai 100 %.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
3. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran , walaupun pemeliharaan dilaksanakan berkesinambungan setiap tahun namun karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti musim penghujan yang lama dan tingginya debit air hujan mengakibatkan tidak terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan secara optimal.

Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu adanya kebijakan yang memudahhi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah,serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja(PK);
3. Perlu penambahan anggaran untuk menuntaskan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase ;
4. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memperbaiki capaian kinerja dengan menganalisis kembali kebutuhan yang belum terpenuhi dalam mencapai tujuan , sasaran dan program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
2. Memperbaiki data -data dasar sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan target capaian program dan kegiatan
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya agar lebih optimal untuk menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan mengikut sertakan dalam berbagai diklat teknis .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Merumuskan dan Menyelaraskan indikator kinerja program / kegiatan dengan indikator kinerja utama yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound) guna mengakomodasi perubahan kelembagaan yang tertuang dalam peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta telah memperbaiki dan menambahkan indikator program terkait dengan kelembagaan yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 . tertanggal 29 Juni 2021
2.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengajuan tunjangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Dan akan memberikan ranking serta raport dan sertifikat terhadap setiap capaian kinerja per triwulan , yang terbaik akan mendapatkan sertifikat terbaik dan capaian terendah akan mendapatkan teguran / peringatan. Untuk kedisiplinan pegawai kami telah membuat teguran / peringatan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
3.	Memastikan Validasi data kinerja masing-masing bidang yang akan dicantumkan dalam laporan kinerja	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan lebih cermat untuk memastikan kevalidan data- data pendukung yang

	diberikan oleh bidang-bidang untuk penyusunan Laporan Kinerja .
--	---

Yogyakarta , 21 Juli 2021

Kepala Dinas



Ir. Hari Setyawacana, MT
NIP. 19640126 199303 1 005